

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan lebih dari 220.000 orang tewas dalam konflik Suriah yang dimulai sejak Maret 2011. Lebih dari sembilan juta warga Suriah mengungsi, baik di dalam negeri maupun keluar negeri (UNHCR, 2015). Eropa menjadi salah satu tujuan utama pengungsi Suriah. Akibatnya, saat ini Eropa tengah menghadapi krisis keimigrasian terbesar sejak Perang Dunia II (Kompas, 2015).

Menurut badan perbatasan UE (Uni Eropa) Frontex, lebih dari 310.000 pencari suaka telah menyeberangi laut Mediterania ke Eropa pada tahun 2015, sekitar 40 persen lebih banyak dibandingkan tahun 2014. PBB menyatakan bawa sedikitnya 224.000 orang migran dan pengungsi telah menyeberangi Laut Tengah menuju Eropa sepanjang tahun 2015 (national geographic, 2015).

Menghadapi gelombang pengungsi dan pencari suaka yang semakin besar, mayoritas negara Eropa cenderung enggan menerima pencari suaka. Beberapa diantaranya bahkan menahan pengungsi untuk masuk, dan menggunakan opsi militer untuk mengatasi penyebab migrasi. Negara-negara anggota UE menolak kuota imigran yang bersifat mengikat dan memilih melaksanakan kuota sukarela. Namun gelombang pengungsi yang terus datang memaksa UE untuk menyusun kuota imigran baru yang lebih proposional (Kompas, 2015).

Inggris merupakan salah satu negara tujuan pengungsi yang tidak menerapkan kebijakan suaka proporsional. Pemerintah Inggris akan segera menggelar sidang pemungutan suara untuk mengambil sikap militer kepada Suriah guna mengakhiri masalah pengungsi (Detik.com, 2015). Austria akan memenjarakan pencari suaka illegal dan memperketat pengawasan perbatasan (The Wall Street Journal, 2015). Sementara itu Slovakia, Polandia dan Hungaria telah mengatakan mereka memprioritaskan pengungsi beragama Nasrani terlebih dahulu. Kebijakan tersebut mendapat kritik Paus Fransiskus yang merupakan pemimpin umat Katolik sedunia. Tindakan itu dianggapnya sebagai tindakan kekerasan (Republika, 2015) .

Perancis, Italia dan Jerman mendesak UE untuk menyusun kembali kuota imigran baru agar para pengungsi ditempatkan dan dibagi secara adil di 28 negara anggota UE. Selanjutnya UE diminta untuk segera memperbaiki kesiapan terkait masalah tempat pendaftaran dan penyaringan pengungsi di setiap negara UE. Hal itu guna memenuhi kebutuhan pencari suaka akan tempat tinggal dan makanan, serta mengenai daftar negara asal yang aman (bebas dari konflik) agar pengajuan suaka oleh pengungsi dari negara-negara yang aman tersebut dapat secara otomatis ditolak (Suara Pembaruan, 2015).

Penanganan pencari suaka di Eropa saat ini tidak lagi berpedoman pada Konvensi Dublin. Dalam Konvensi tersebut, negara-negara di mana imigran pertama kali masuk seharusnya melakukan penyaringan, hanya pencari suaka yang telah berstatus pengungsi yang berhak melanjutkan perjalanan ke negara tujuan. Sementara mereka yang berstatus non-pengungsi atau imigran ekonomi akan dideportasi

(Republika, 2015). Italia, Austria, Yunani dan Hungaria yang merupakan negara “gerbang masuk” pengungsi ke Eropa mulai kewalahan. Italia dan Yunani mengaku tidak sanggup untuk menangani masalah ini dan membiarkan para pencari suaka tersebut berlalu menuju Eropa Barat tanpa melalui registrasi. Sejumlah negara UE dan Eropa mulai berusaha memagari negaranya terhadap para pengungsi (Michael, 2015).

Gelombang pengungsi Suriah yang semakin meningkat juga menimbulkan masalah lain yaitu berkembangnya *xenophobia* di Eropa . Handmaker & Parsley menjelaskan *xenophobia* (2002) sebagai :

ketakutan irasional terhadap sesuatu yang tidak diketahui, ketakutan atau kebencian terhadap orang asing (negara lain) yang didasarkan pada mitos dan stereotype yang mengambang hitamkan orang asing sebagai sumber masalah domestik antara lain masalah ekonomi dan sosial.

Dengan kata lain *xenophobia* dapat diartikan sebagai sebuah kebencian atau rasa benci yang tidak beralasan terhadap orang asing atau sesuatu yang berbau asing yang dipicu oleh rasa kebangsaan dan kesukuan yang berlebihan yang mengakibatkan diskriminasi terhadap orang lain (Kompasiana) .

Meskipun kawasan Eropa umumnya merupakan negara demokratis, namun sebagian warga Eropa yang *phobia* dengan komunitas Muslim mengkhawatirkan semakin besarnya jumlah pengungsi Suriah yang memasuki Eropa. Mereka menentang konsep multikulturalisme dan tepengaruh isu *xenophobia* (Kompasiana). Meminjam definisi multikulturalisme dari A.Rifai Harahap yang ia kutip dari M .

Atho' Muzhar (Kurniawan, 2015), ia menjelaskan bahwa multikulturalisme mencakup:

gagasan, cara pandang, kebijakan, penyikapan dan tindakan oleh masyarakat suatu negara yang majemuk dari segi etnis, budaya, agama dan sebagainya namun mempunyai cita-cita untuk mengembangkan semangat kebangsaan yang sama dan kebanggaan untuk mempertahankan kemajemukan itu.

Gelombang *xenophobia* kemudian menjurus ke *islamophobia*. Bagi mereka yang berpandangan konservatif dan anti-Islam masuknya pengungsi dari Suriah menjadi ruang terbuka bagi berkembangnya multikulturalisme dan Islamisasi di Eropa. Selama ini kawasan Eropa hanya didominasi oleh budaya barat Eropa dengan ras Kaukasoidnya. Dominasi tersebut bisa mencair dengan hadirnya imigran dari timur yang umumnya berasal dari Arab. Islam yang dibawa orang-orang Arab ternyata berkembang pesat di Eropa. Perkembangan itulah yang kemudian dianggap menjadi ancaman bagi bangsa Barat khususnya yang beraliran konservatif ultra kanan (Kompasiana).

Norwegia menjadi negara yang sangat diguncangkan oleh isu tersebut. Pada 22 Juli 2011 terjadi serangkaian serangan tragis di Norwegia yang menewaskan sekitar 90 orang. Serangan itu terjadi di dua tempat yang berbeda dalam waktu hampir bersamaan. Serangan pertama adalah meledaknya bom di Oslo, dekat kantor pemerintah. Sedangkan serangan kedua adalah penembakan yang terjadi di Pulau Otøya dimana sedang berlangsung *summer camp* yang dilaksanakan oleh AUF (Workers' Youth League) divisi pemuda dari Partai Buruh. Aksi tersebut

menewaskan 68 orang yang berusia antara 13-30 tahun. Dua serangan yang hampir bersamaan ini menjadikan tragedi tersebut kerap disebut sebagai “*twin attack* “ (Hidayat, 2012).

Setelah dilakukan penyelidikan oleh kepolisian Norwegia diketahui bahwa pelakunya adalah Anders Behring Breivik. Penyerangan yang dilakukan Breivik dilatari oleh sikap penolakan dan penentangannya terhadap praktik multikulturalisme dan maraknya arus imigran di Norwegia. Breivik merupakan penganut paham ultra kanan yang sangat membenci pandangan multikulturalisme dan imigran asing khususnya warga dari negara-negara Islam. Anders Behring Breivik adalah seorang Kristen fundamental sayap kanan, ideologi gerakannya adalah berusaha menolak kebijakan imigrasi Norwegia dan Eropa yang membuat kelompok-kelompok non Eropa terutama muslim dapat dengan mudah memasuki Eropa (Kompas).

Lebih jauh, kelompok Kristen fundamentalis ini berusaha mengembalikan kejayaan bangsa dan masyarakat Eropa yang banyak didominasi oleh Kristen dengan menolak ide-ide tentang multikulturalisme yang menerima segala bentuk perbedaan dan bersedia untuk hidup berdampingan. Breivik bahkan menulis manifesto pemikirannya tersebut dalam situs pribadi serta di akun facebook dan twitter miliknya. Dalam manifesto tersebut Breivik menyebut telah terjadi proses Islamisasi di Eropa dan semua pihak yang memungkinkan itu terjadi harus dihukum. Sehingga

Partai Buruh yang selama ini terbuka terhadap arus imigran Arab di Norwegia harus mendapat ganjaran. (Kompas)

Pada September 2013, Pemerintah koalisi kiri pimpinan Perdana Menteri Jens Stoltenberg mengalami kekalahan dalam pemilu. Aliansi konservatif kanan yang terdiri dari empat partai yaitu Partai Konservatif (*Conservatives Party*), Partai Kemajuan (*Progress Party*), Partai Kristen Demokrat (*Christian Democrats Party*) dan Partai Liberal (*Liberals Party*) memenangkan pemilu dan menduduki mayoritas kursi parlemen. Partai Konservatif sebagai pimpinan koalisi ini menempatkan Erna Solberg sebagai perdana menteri Norwegia yang baru. Aliansi ini berhaluan kanan dan cenderung menentang kebijakan pro imigran. *Progress Party* sendiri merupakan partai dimana pelaku teror *twin attack* Anders Behring Breivik pernah menjadi kadernya dari tahun 1991 sampai 2006 (Kompas.com, 2011).

Diguncang serangan *twin attack* pada 2011 dan pergantian pemerintah baru yang berhaluan kanan, nyatanya Norwegia tetap melanjutkan kebijakan untuk menerima pengungsi Suriah. Norwegia setuju untuk menerima 8.000 pengungsi Suriah sampai dengan akhir tahun 2017 (Republika online, 2015). Norwegia berencana menampung 2.000 pengungsi Suriah pada 2015, naik 500 dibandingkan rencana semula dan disusul oleh masing-masing 3.000 pengungsi pada 2016 dan 2017 (Republika online, 2015). Hal itu diperkuat oleh pernyataan dari Ketua Dewan Pengungsi Norwegia (*Norwegian Refugee Council*). Dikutip dari Republika online

(2015), ia menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan Pemerintah Norwegia merupakan jalan yang benar serta mengajak negara-negara Eropa lain untuk mengikuti langkah Norwegia sebagai jalan mengatasi krisis kemanusiaan terbesar sejak Perang Dunia II.

Cukup mengejutkan ketika Norwegia tetap melanjutkan kebijakan menerima pengungsi Suriah, melihat hanya berselang tiga tahun setelah serangan *twin attack*. *Xenophobia* yang melandasi serangan tersebut menandakan sebagian orang dari kelompok sayap kanan tidak main-main dalam melakukan aksi protesnya terhadap kebijakan pemerintah mengenai pengungsi. Apalagi pemerintah Norwegia saat ini dipimpin oleh Perdana Menteri Erna Solberg dari Partai Konservatif yang juga menentang kebijakan pro imigran. Hal tersebut kemudian menarik penulis untuk menganalisa *alasan Norwegia menerima 8.000 pengungsi Suriah ditengah isu xenophobia dan disaat negara-negara Eropa lainnya berusaha “mengabaikan pengungsi.”*

B. Rumusan Masalah

- Mengapa Norwegia tetap menerima pengungsi Suriah di tengah isu *xenophobia* yang melanda negara tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan Norwegia menerima delapan ribu pengungsi Suriah di tengah isu *xenophobia*.

D. Kerangka Berpikir

Meningkatnya keragaman etnis dan ras di hampir seluruh negara adalah konsekuensi tak terelakkan dari fenomena migrasi dan globalisasi. Peningkatan ini menghadapkan negara pada masyarakat yang lebih multietnis serta tantangan untuk mampu mengakomodasi masyarakat dari kultur, ras, agama, dan bahasa yang berbeda. Negara diharuskan untuk menemukan mekanisme politik, sosial, dan ekonomi yang tepat untuk menjembatani perbedaan dan menjamin adanya sikap saling menghargai dalam perbedaan dalam masyarakat (UNHCR, 2001).

Negara-negara yang telah menerima banyak imigran, baik sebagai pekerja pencari suaka dan pengungsi mulai menghadapi munculnya fenomena *xenophobia* dan rasisme (UNHCR, 2001). UNHCR dalam *World Conference Against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia And Related Intolerance* (2001) menyatakan bahwa fenomena tersebut menjadi faktor utama meningkatnya diskriminasi dan kekerasan terhadap imigran dan pengungsi di beberapa negara terutama diskriminasi rasial. Dalam *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (United Nations, 1965) diskriminasi rasial diartikan sebagai:

“any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent or national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on a equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life.”

Sangat disayangkan pemerintah sering menyembunyikan bahkan menyangkal adanya diskriminasi rasial padahal nyatanya hal itu terjadi di tengah tengah masyarakat baik pelecehan secara verbal maupun fisik (UNHCR, 2001).

Xenophobia dan rasisme sering mengakibatkan satu efek yang sama yaitu diskriminasi rasial tapi kita tidak bisa mentah-mentah menyamakan keduanya. *Xenophobia* berasal dari bahasa Yunani “*xheno*” asing dan “*phobia*” ketakutan (Demker, 2007). Istilah ini kemudian berkembang untuk menggambarkan ketakutan terhadap hal hal yang berbau asing. Mengutip dari Handmaker & Parsley (2002), Annis Bayaga (2011) mendefinisikan *xenophobia* sebagai ketakutan irasional terhadap sesuatu yang tidak diketahui, ketakutan atau kebencian terhadap orang asing (negara lain) yang didasarkan pada mitos dan stereotip yang mengambang hitamkan orang asing sebagai sumber masalah domestik antara lain masalah ekonomi dan sosial. Mojca Pajnik (2002) menambahkan bahwa *xenophobia* adalah ketakutan berlebihan dengan dalih melindungi identitas bangsa dari orang asing:

Protection of the belief is that we as individuals and our pure values of civilization are being protected from the “others”, their barbarism, faulty morals and savage values. And who are these others and those who different? They are immigrants, Roma, Jews, Chechens, the mentally ill and etc.

Definisi tersebut menjadikan *xenophobia* sangat erat hubungannya dengan paham rasisme. Perbedaan antara dua paham itu secara jelas termaktub dalam *World Conference Against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia And Related Intolerance (WCAR)* (UNHCR, 2001):

- *Racism is an ideological construct that assigns a certain race and/ or ethnic group to a position of power over others on the basis of physical and cultural attributes, as well as economic wealth, involving hierarchical relations where the “superior” race exercises domination and control over others;*

- *Xenophobia describes attitudes, prejudices and behavior that reject, exclude and often vilify persons, based on the perception that they are outsiders or foreigners to the community, society or national identity.*

Megutip dari Bertrand Badie dan Catherine Wihtol de Wenden (1994) Marie Demker (2007) mengatakan bahwa bagaimanapun, rasisme dan *xenophobia* adalah fenomena yang berbeda walaupun mereka sering tumpang tindih. Rasisme secara luas menyiratkan perbedaan yang berdasarkan pada karakter dan ciri fisik, seperti warna kulit, jenis rambut, bentuk wajah, sedangkan *xenophobia* menunjukkan sikap tidak suka atau takut terhadap orang asing atau orang dari negara lain (UNHCR, 2001).

Tanggal 31 Agustus sampai 8 September 2001 PBB menyelenggarakan *World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance* di Durban, Afrika Selatan. Konferensi ini diadakan sebagai tindak lanjut meningkatnya kekerasan yang didasari *xenophobia*. Afrika Selatan mengajukan diri menjadi tuan rumah konferensi ini setelah sejak tahun 1998 berupaya keras menghadapi isu *xenophobia* yang melatar belakangi tindakan kekerasan dan permusuhan di negara itu (UNHCR, 2001).

World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance (2001) mendorong kerjasama antar negara, regional, serta organisasi internasional untuk memeperkuat upaya negara dalam melindungi hak asasi dari setiap korban rasisme, diskriminasi rasial, dan *xenophobia*. Dalam konferensi itu disebutkan bahwa yang menjadi korban dari tindakan kekerasan akibat *xenophobia* sebagian besar adalah warga negara asing, orang Afrika dan keturunan Afrika, *Indegenous people*, imigran serta pengungsi. PBB menyatakan bahwa

ancaman diskriminasi rasial dan *xenophobia* serta kebencian dan sikap memusuhi yang dihadapi imigran, pengungsi, warga negara lain di Eropa, Amerika, Afrika dan Asia telah menjadi pelanggaran HAM serius (UNHCR, 2001).

Kesenjangan ekonomi serta marginalisasi akses ekonomi dan sosial semakin menyulut ketegangan dan manifestasi sikap-sikap rasisme dan *xenophobia* di masyarakat. Keberadaan migran, pengungsi, pencari suaka, serta warga negara asing menjadi kambing hitam untuk disalahkan atas masalah tersebut. Tidak bisa dipungkiri bahwa masuknya imigran dianggap sebagai satu penyebab dari *xenophobia* di sebuah negara. Penelitian yang dilakukan oleh *European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia* (1999) menyimpulkan bahwa ada hubungan antara rasisme dan atau *xenophobia* dengan fenomena imigrasi dan imigran:

“It would be a serious error to say that immigrants or minority members ‘generate’ racism. In actual fact, they are the main victims of it, though not the only ones. Nor can it be said that the number of immigrants is proportional to the number of racist acts. The fact remains that, by definition, xenophobia is an attitude of rejection and stigmatism of foreigners, and that it can very quickly and very easily cross the line that divides it from racism.”

Stigma negatif yang melekat pada imigran semakin berkembang luas di masyarakat. Akibatnya masyarakat menyamaratakan semua imigran. Mereka dianggap masuk ke negara secara ilegal dan lekat dengan tindakan kriminalitas, bahkan bagi imigran yang masuk dengan status pengungsi muncul anggapan bahwa mereka adalah "pencari suaka palsu" dan hanya menambah angka kriminalitas dan pengangguran (Migrants Rights International, 2001). Anggapan itu kemudian menjadi pembenaran terhadap tindakan kekerasan yang didasari oleh *xenophobia*.

Pemerintah juga dianggap bertanggung jawab atas berkembangnya kekerasan terhadap migran dan pengungsi. Keadaan dan stigma negatif kepada imigran seperti sengaja dibiarkan begitu saja. Pemberitaan media, diskusi-diskusi publik, bahkan pernyataan pernyataan dari politisi selalu mengasosiasikan imigran dengan kejahatan, perdagangan manusia, obat-obatan terlarang, penyakit, AIDS dan penyakit sosial lainnya, seolah-olah mereka sengaja dikriminalisasi (Migrants Rights International, 2001). Mereka yang dianggap sebagai imigran gelap juga dianggap tidak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Secara umum, migrasi dicirikan sebagai masalah dan mengancam identitas dan keamanan nasional. Walaupun begitu, kebijakan imigrasi yang ketat dari pemerintah tidak lantas mengurangi dampak *xenophobia* (Migrants Rights International, 2001).

Konsep monokultur atau monoetnik yang dipahami sebagai identitas ras, etnis, budaya, bahasa, tradisi, agama, dan asal kebangsaan yang berbeda malah semakin menyulut sikap *xenophobia*. Komunitas internasional, negara, dan organisasi internasional gencar mempromosikan paham "multikulturalisme" (UNHCR, 2001). M. Atho' Muzhar (Kurniawan, 2015) menerangkan bahwa multikulturalisme mencakup:

gagasan, cara pandang, kebijakan, penyikapan dan tindakan oleh masyarakat suatu negara yang majemuk dari segi etnis, budaya, agama dan sebagainya namun mempunyai cita-cita untuk mengembangkan semangat kebangsaan yang sama dan kebanggaan untuk mempertahankan kemajemukan itu.

Menghormati keragaman, menghormati nilai-nilai dan identitas lain/berbeda dianggap sebagai salah satu pendekatan yang paling efektif untuk mengubah sikap

dan mengurangi ekspresi permusuhan rasis dan *xenophobia* terhadap migran, pengungsi dan warga negara lain (UNHCR, 2001) .

Kebijakan Norwegia untuk menerima 8.000 pengungsi Suriah merupakan keputusan yang cukup riskan bagi pemerintah Norwegia mengingat isu *Xenophobia* yang tengah melanda negara itu. Terlebih lagi setelah serangan “Twin Attack” yang menewaskan lebih dari 90 orang membuktikan isu tersebut bisa sangat membahayakan kondisi keamanan dalam negeri. Ada faktor-faktor tertentu yang membuat pemerintah Norwegia berani mengambil kebijakan ini. Menurut William. D Coplin (1992) ada tiga determinan yang mampu mempengaruhi kebijakan luar negeri sebuah negara.

1. Situasi politik dalam negeri

Politik dalam negeri juga merupakan seperangkat determinan yang mempengaruhi politik luar negeri. Keterbukaan suatu sistem politik atau tingkat stabilitas dalam negeri mampu membentuk aspek-aspek politik luar negeri.

2. Kondisi Ekonomi dan Militer

Kondisi ekonomi dan militer menciptakan kemampuan yang diperlukan untuk menopang politik luar negeri. Terlebih lagi untuk kondisi militer selalu digunakan untuk mendasari pertimbangan keamanan dan pertahanan.

3. Konteks Internasional

Ada tiga elemen penting sebagai dampak konteks internasional terhadap politik luar negeri suatu negara yaitu elemen geografis, ekonomis, dan politis. Lingkungan internasional adalah dimana letak negara itu dalam sebuah wilayah geografis, yang selanjutnya mencakup pergaulan negara dengan negara baik hubungan ekonomi maupun politik.

Politik dalam negeri sebagai salah satu determinan dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri menggambarkan bahwa ada aktor-aktor dalam negeri yang berupaya untuk mempengaruhi tindakan politik luar negeri suatu negara (Coplin, 1992). Coplin (1992) menyebutnya sebagai *policy influencers* yang kemudian dibagi menjadi empat macam yaitu :

1. *Bureaucratic influencer*, merupakan beberapa individu atau organisasi dalam lembaga pemerintah yang membantu pengambil keputusan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan luar negeri. Anggota birokrasi yang bertindak sebagai *policy influencer* kadang juga menjadi pengambil keputusan. *Bureaucratic influencer* memiliki akses langsung kepada para pengambil kebijakan dengan memberikan informasi kepada mereka sekaligus melaksanakan kebijakan luar negeri yang di putuskan. Karenanya *Bureaucratic influencer* memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pengambilan kebijakan.
2. *Partisan influencer*, merupakan kelompok-kelompok yang bertujuan menerjemahkan tuntutan masyarakat menjadi tuntutan politis terkait

kebijakan pemerintah. Mereka berupaya mempengaruhi kebijakan dengan cara menekan penguasa dan menyediakan orang-orang yang bisa berperan dalam pengambilan keputusan. Misalnya partai politik.

3. *Interest influencer*, yaitu sekelompok individu yang bergabung bersama karena mempunyai kepentingan yang sama. Mereka biasanya melancarkan kampanye dengan menulis surat yang tidak hanya ditujukan kepada pengambil keputusan tapi kepada *Bureaucratic influencer* dan *Partisan influencer* juga. Mereka juga menjanjikan dukungan finansial atau mengancam akan menarik dukungan selain itu mereka berperan dalam mengkritisi para pengambil kebijakn luar negeri.
4. *Mass influencer*, terwujud dalam opini publik yang dibentuk oleh media massa dan pemimpin dari komunitas yang berpengaruh. Para pengambil keputusan menggunakan opini publik bukan untuk membentuk kebijakan luar negeri tapi untuk merasionalisasikannya. Pendapat dari kelompok ini sering menjadi pertimbangan para pengambil keputusan untuk menyusun kebijakan luar negeri.

E. Hipotesa

Dari rumusan masalah yang telah diajukan penulis diatas, alasan Norwegia menerima 8000 pengungsi Suriah ditengah isu *xenophobia* adalah

1. Adanya tekanan dari Partai Buruh (*DNA*) selaku partai oposisi terhadap pemerintahan Erna Solberg.

2. Tekanan masyarakat dalam bentuk opini publik terhadap pemerintahan Erna Solberg.

F. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif eksplanatif, yaitu berupaya untuk menjelaskan alasan Norwegia menerima 8000 pengungsi Suriah dari tahun 2015 sampai tahun 2017. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah, tinjauan pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan data-data sekunder yang bersumber dari buku-buku, artikel, dan data-data dari internet yang tingkat kapabilitasnya terhadap permasalahan yang dihadapi dan validitasnya dapat dipertanggung jawabkan. Teknik analisis data yang telah digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yang menjelaskan dan menganalisis data dengan cara menggambarkan hasil penelitian melalui sejumlah data yang berhasil dikumpulkan penulis.

G. Jangkauan penelitian

Penulis membatasi penelitian dalam skripsi ini dari tahun 2005 sampai Juni 2015, saat pemerintahan Perdana Menteri Jens Stoltenberg dan Erna Solberg.

H. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teori, hipotesa, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

- Bab II** : Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan krisis pengungsi di Eropa dan dampak yang diakibatkan.
- Bab III** : Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan tentang isu *xenophobia* dan implikasinya terhadap kebijakan imigrasi Norwegia.
- Bab IV** : Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan hubungan antara kondisi dalam negeri Norwegia dengan pengambilan kebijakan Norwegia untuk menerima 8000 pengungsi Suriah
- Bab V** : Kesimpulan